



## Soal Bansos, Ketua Dewan Panggil Sekda

★ Bansos Diharap Cair Akhir November



DENPASAR, NusaBali

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama secara khusus panggil Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun, ke Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (30/10). Pemanggilan ini dilakukan untuk atur strategi dan persiapan sambut kedatangan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Bali guna membedah payung hukum pencairan bansos/hibah, 7 November 2015 depan.

Saat panggil Sekda Provinsi Tjok Pemayun untuk pertemuan tertutup di Gedung Dewan, Jumat kemarin, Adi Wiryatama didampingi Ketua Pansus APBD 2016 DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Ketut Kariyasa Adnyana, serta Sekretaris Komisi II DPRD Bali (membidangi pajak,

• NUSABALI/SUKANTA

Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama tunjukkan SE Mendagri tentang aturan bansos

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Sabtu, 31 Oktober 2015

Hal : 1



## Soal Bansos, Ketua Dewan Panggil Sekda

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

keuangan daerah, perekonomian) Made Budastra. Sedangkan Tjok Pemaun didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Wayan Suarjana.

Pertemuan tertutup yang digelar di Ruang Sekwan DPRD Bali kemarin berlangsung sekitar 1 jam. Intinya, Pemprov dan DPRD Bali sudah siap menerima kedatangan Dirjen Otda Kemendagri terkait bedah masalah aturan pencairan bansos/hibah. Kesepakatan untuk penyamaan persepsi dalam bedah aturan hukum bansos/hibah, juga sudah final antara eksekutif dan legislatif.

Ditemui NusaBali se usai pertemuan, Adi Wiryatama mengatakan secara teknis sudah tidak ada masalah terkait pencairan bansos senilai total Rp 46 miliar yang difasilitasi 55 anggota DPRD Bali melalui APBD Perubahan 2015. "Sekda Provinsi kita undang untuk mengecek materi yang akan kita bahas saat menerima Dirjen Otda Kemendagri di Gedung

Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Sabtu pekan depan. Kita matangkanlah di Dewan dengan Pansus dan eksekutif, supaya nanti tidak lagi berubah-ubah," ujar politisi senior PDIP ini.

Menurut Adi Wiryatama, tidak ada lagi istilah pencairan bansos/hibah ditunda-tunda. Sebab, waktu pencairan sudah mepet. "Kita hanya punya waktu sebulan lagi. Sekarang kita dengan eksekutif matangkan, supaya apa yang nanti digeber dalam pertemuan dengan Dirjen Otda bisa satu kata. Ini memang bukan MoU, kita mau semuanya berjalan sesuai mekanisme. Kerja kita juga aman untuk kepentingan masyarakat," tandas mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Di samping penyamaan strategi dan penyamaan persepsi, lanjut Adi Wiryatama, dalam pertemuan kemarin juga dibahas soal sampai di mana proses pengusulan bansos/hibah oleh masyarakat. "Sebab sudah banyak proposal yang masuk ke Dewan. Kita

maunya supaya tidak numpuk, ya proses lanjut saja dulu. Pengalaman tahun sebelumnya, proposal bansos numpuk, petugas tidak bisa memproses semuanya, hingga akhirnya ada yang tidak cair."

Sementara itu, Ketua Pansus APBD 2016 DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, berharap pencairan bansos/hibah harus bisa tuntas sebelum awal Desember 2015. Masalahnya, di masyarakat saat ini sudah mulai beredar isu macam-macam. "Ini kan menjelang Pilkada 2015. Kita mau bahwa kita terbuka saja, bansos ini untuk rakyat, Dewan hanya memfasilitasi saja," ujar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Kariyasa mengatakan, ada isu yang menyebutkan bansos sengaja tidak dicairkan, karena mau Pilkada. "Kalau isu seperti ini bergulir, kan berat kita di Dewan. Sementara kita komitmen berjuang supaya bansos cair secepatnya," tandas Kariyasa yang mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009. **nat**